



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI
SUB UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARTOYO**
2. Jabatan : **HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **166346**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.430.569.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/150 m2 di SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 208.350.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1225 m2/256 m2 di KOTA METRO , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 313.112.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/152 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 818.432.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/54 m2 di LAMPUNG TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 42.752.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m2/54 m2 di KOTA METRO , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 117.912.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/105 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 678.015.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m2/332 m2 di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.856.220.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/200 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 395.776.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 910.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, JEEP WILYS JEEP Tahun 1960, HASIL SENDIRI Rp.



60.000.000

4. MOTOR, HARLEY DAVIDSON HARLEY DAVIDSON Tahun 2012,

HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	192.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.901.756.924
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.434.325.924
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.434.325.924

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.